
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Program Saringan Sampah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Rifda Shaliha

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
*Corresponding author, e-mail: rifdash2@gmail.com

Abstract

The issues of waste and flooding are interrelated and influence each other. Waste accumulates in the Ciliwung River, most of which is waste transported from upstream in Jakarta, causing high levels of waste that pollute the water environment and cause flooding in Jakarta. The implementation of a waste screening programme is one solution to the flooding problem; however, its implementation still faces several challenges, such as high waste accumulation, a large volume of waste transported downstream, ongoing flooding, and limited budget. The objective of this study is to examine and analyse the implementation of waste management policies in the Waste Screening Programme by the Waste Management Unit of the Water Agency (UPSBA) under the Jakarta Capital City Environment Agency. This study employs the implementation theory. It uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection technique employed in this study is triangulation. The results of this study indicate that the implementation is sufficiently effective. This is evident from the two policy implementation indicators according to Merilee S. Grindle: (1) Policy Content, which involves differing interests but influences the success of the programme, the types of benefits achieved in line with its functions, positive changes, decisions made through top-down strategies, and effective implementation supported by adequate resources, (2) Policy Environment, which involves the power and strategies of actors, and institutional characteristics that positively influence support from other parties, as well as compliance levels and responsiveness that maintain consistency in implementation according to plan. However, the community living around the waste screening facility has not yet felt the direct benefits and has caused noise and odour pollution.

Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Waste Filter



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

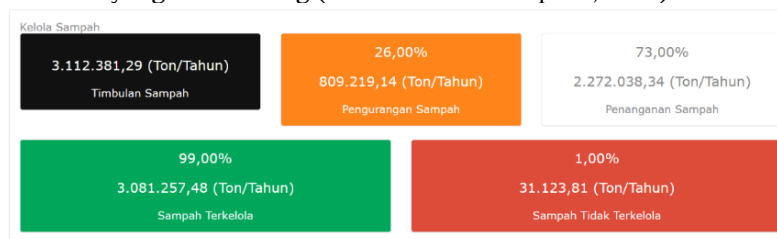
Kondisi dimana jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, tentunya terdapat berbagai tantangan dalam mengatur tata ruang kotanya. Tata ruang kota ini sangat penting keberadaannya karena jika tidak ada pengaturan mengenai tata ruang kota, maka di kemudian hari Indonesia akan menjadi negara yang tidak tertata sebab adanya pertumbuhan urbanisasi yang cepat. Sehubungan dengan hal tersebut membuat ruang terbuka di Indonesia menjadi terbatas mengharuskan adanya penataan ruang yang efektif dengan melibatkan berbagai stakeholder agar dapat menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Akbar, 2022). Menurut Imran, pada hakikatnya, tata ruang memiliki fungsi untuk dapat mengoptimalkan manfaat dari berbagai sumber daya dengan meminimalisir terjadinya konflik pada kegiatan pemanfaatan

yang ada untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan mampu meningkatkan keseimbangan (Nisa, 2020).

Maka sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah bersama dengan stakeholder memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan mengenai tata ruang sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik (Hakim et al., 2021). Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan bahwa untuk merencanakan tata ruang yang baik setidaknya perlu menyediakan sebanyak tiga puluh persen dari jumlah lahan untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan smart environment (Kemendagri, 2007). Namun, pengimplementasian smart environment ini juga dihadapi oleh tantangan yang beragam, seperti terbatasnya infrastruktur yang memadai, sistem birokrasi yang kompleks, dan anggaran yang terbatas (Nurlukman & Basit, 2023). Namun hadirnya kebijakan mengenai tata ruang ini tidak membuat proses pelaksanaannya berjalan dengan baik, sering kali implementasi tata ruang kota ini terhambat yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor administratif, keuangan, dan politik. Oleh sebab itu, keberadaan tata ruang kota di Indonesia terutama di Jakarta harus ditingkatkan lagi pemahamannya agar dapat secara optimal mampu mengatasi berbagai hambatan dari pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakatnya.

Dengan banyaknya penumpukan sampah membuat kota menjadi tidak nyaman karena memiliki lingkungan yang telah tercemar dan tidak jarang juga hal ini menimbulkan genangan air saat curah hujan sedang tinggi membuat luapan air sungai sehingga tidak jarang sampa membanjiri ruas jalan utama yang sering dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi para pengguna jalan karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu produktivitas perekonomian masyarakat yang sebagian besar memiliki pekerjaan di sekitar jalur yang rawan tergenang banjir yang berasal dari luapan aliran sungai yang berada di sekitarnya (Wekke, 2021). Aliran air sungai yang sering meluap tidak jarang disebabkan pula oleh banyaknya penumpukan sampah yang menyumbat bendungan air sungai, sehingga air dengan mudah membanjiri jalanan sebab bendungan air tersebut tidak kuat menampung debit air yang tinggi saat hujan terjadi terus menerus tanpa henti.

Dengan demikian kota Jakarta perlu mewujudkan kota nyaman yang berkelanjutan agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat baik dari bidang ekonomi maupun lingkungan, salah satunya yaitu rencana mengoptimalkan pengelolaan sampah seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan (El Salamony et al., 2024). Menurut Girardet, Kota yang berkelanjutan merupakan kota yang mampu memberikan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya, tanpa perlu merusak lingkungan maupun kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang (Kazemi & Hosseinpour, 2022).



Gambar 1. Dashboard Persampahan DKI Jakarta
Sumber: silika.jakarta.go.id, diakses pada Februari 2025

Berdasarkan gambar 1, dapat diketahui bahwa total timbulan sampah yang ada di keseluruhan wilayah DKI Jakarta terdapat sekitar 3,112 juta ton per tahunnya yang terdapat

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Program Saringan Sampah ...

pengurangan total sampah sebanyak 800 ribu ton tiap tahun, sampah yang dapat ditangani dalam setahun sekitar 3 juta ton. Dengan total sampah yang dapat terkelola sebanyak 3,081 juta ton per tahun, sedangkan total sampah yang tidak terkelola terdapat sebanyak 31 ton per tahun yang kemudian diangkut menuju Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Kondisi penumpukan sampah yang terdapat di Kota Jakarta saat ini keadaannya sangat mengkhawatirkan sebab jumlahnya terus terjadi peningkatan. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang kurang dalam kesadaran diri untuk menjaga lingkungannya dengan membuang sampah sesuai tempatnya sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di banyak lokasi di Jakarta (Islamiyah et al., 2022). Sampah-sampah ini juga banyak ditemukan tergenang menumpuk di sungai yang mengalir hingga menumpuk ke aliran sungai utama yakni sungai Ciliwung. Mayoritas sampah yang menumpuk adalah sampah hasil rumah tangga yang sulit untuk dapat terurai. Telah tercatat pada tahun 2023, terdapat sebanyak 63 ribu ton sampah yang tertimbun di aliran air sungai yang terdapat di Jakarta yang kemudian akan diangkut ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (B. U. Jakarta, 2023).

Terdapat beberapa kota di Indonesia yang telah menerapkan pengelolaan sampah yaitu Sukabumi, Salatiga, dan Medan. Di Desa Jayabakti, Sukabumi melaksanakan pengelolaan sampah dengan membangun lubang resapan biopori yang bertujuan untuk meningkatkan serapan air ke dalam tanah agar dapat mengurangi terjadinya banjir, untuk meningkatkan kualitas dari tanah sekitar terpasangnya lubang biopori ini, serta memanfaatkan sampah organik untuk kemudian dijadikan pupuk kompos. Dalam upaya pengelolaan sampah ini sangat diperlukan partisipasi dari masyarakatnya untuk dapat membantu memperbanyak lubang biopori dan membantu untuk melakukan perawatan terhadap lubang yang telah ada agar penggunaannya dapat berjalan dengan efisien dan berkelanjutan (Mustopa et al., 2023). Upaya pengelolaan sampah yang dilakukan di Kota Salatiga adalah penerapan sistem kumpulkan-angkut-buang, pengolahan, dan penimbunan. Menurut Septiani, dalam pelaksanaannya, pemerintah Salatiga fokus untuk memberikan edukasi masyarakat dalam mengelola sampah, meningkatkan kapasitas dari bank sampah, meningkatkan keseimbangan antara pengepul dan bank sampah, serta melaksanakan pengolahan sampah akhir yang diprioritaskan untuk jenis sampah yang sudah tidak dapat diolah lagi (Sutalhis et al., 2024). Sedangkan di kota Medan, melaksanakan pengelolaan sampah dengan membangun Bank Sampah Induk di Sicanang yang keberadaannya tidak hanya berguna untuk menjaga lingkungan, tetapi juga berguna untuk meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Dalam pengelolaan bank sampah ini pihak terkait bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendapatkan sumber anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program pengembangan untuk masyarakat seperti melakukan lokakarya dalam daur ulang, meningkatkan promosi bank sampah, merencanakan pembangunan cabang bank sampah ini, mencari investor baru, serta melaksanakan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah (Auliani, 2020).

Sehubungan dengan banyaknya penumpukan sampah di aliran sungai itu, Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan beberapa upaya untuk dapat mengatasi permasalahan sampah yakni salah satunya kebijakan mengenai pengelolaan sampah dan program pembangunan saringan sampah di beberapa bendungan. Menurut Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah bahwa pemerintah perlu untuk memaksimalkan pelayanan publik dalam kegiatan pengelolaan sampah dengan menambah sarana dan prasarana terkait dengan fasilitas yang dapat mengelola sampah yang tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2019). Peristiwa penumpukan sampah ini harus segera diatasi sebab telah menimbulkan banyak dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari penumpukan sampah terhadap lingkungan adalah mencemari tanah, mencemari air, dan menimbulkan polusi udara. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari adanya penumpukan

sampah terhadap kesehatan adalah menimbulkan penyakit pernafasan, menimbulkan penyakit pada saluran pencernaan, dan menimbulkan gejala disentri (Disperkimta, 2019). Sehubungan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyusun Rencana Strategis pada periode 2017-2022 untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dengan menurunkan ke beberapa program. Salah satu program yang terdapat dalam Rencana Strategis DLH Tahun 2020 adalah pembangunan saringan sampah di perbatasan (D. D. Jakarta, 2021).

Maka dari untuk mewujudkan kota nyaman yang berkelanjutan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta merencanakan pengelolaan sampah melalui program pembangunan saringan sampah di beberapa lokasi yang salah satunya terdapat di perbatasan TB Simatupang. Pembangunan saringan sampah di TB Simatupang bertujuan agar dapat menahan tumpukan sampah yang berasal dari daerah sekitar Jakarta supaya sampah-sampah tersebut tidak tergenang mengalir menuju pusat kota yang kemudian akan menyebabkan luapan air sungai saat curah hujan sedang tinggi (DLH, 2022). Saringan sampah yang terletak di segmen TB Simatupang, Jakarta Selatan ini merupakan sistem pengambilan dan penanganan sampah pada badan air yang dilakukan untuk merekayasa sungai Ciliwung pada perbatasan Jakarta.

Dengan membangun saringan sampah ini dinilai efektif untuk menahan sampah yang menghambat aliran sungai Ciliwung yang mana sampah yang mendominasi adalah sampah batang kayu dan sampah kiriman dari daerah sekitar Jakarta (I. DLH, 2023). Saringan sampah ini dibangun sebagai fasilitas alternatif pengelolaan sampah di Jakarta agar dapat menurunkan jumlah sampah yang akan masuk ke TPST Bantar Gebang yang kini ruangnya telah terbatas yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah sampah yang masuk pada setiap tahunnya. Maka dari itu, pemerintah provinsi DKI Jakarta berupaya untuk menahan peningkatan jumlah sampah ini dengan membangun saringan sampah guna mengurangi penumpukan sampah di aliran sungai utama sungai Ciliwung. Selain itu, saringan sampah ini berfungsi untuk menanggulangi bencana banjir yang sering terjadi di Jakarta yang disebabkan oleh luapan air sungai pada saat musim penghujan. Sebagian besar masalah banjir ini juga disebabkan oleh adanya penumpukan sampah pada sungai sehingga debit air yang tinggi tidak dapat mengalir dengan baik karena sampah tersebut menyumbat pergerakan air.

Tabel 1. Data Saringan Sampah di DKI Jakarta

No	Lokasi	Kelurahan	Wilayah	Volume sampah rata2/bulan(ton)
1	Saringan Sampah TB Simatupang	Tanjung Barat	Jakarta Selatan	600
2	Saringan HEK Kramat Jati	Kampung Tengah	Jakarta Timur	480
3	Saringan Kali Cipinang-Tol Jagorawi	Kampung Dukuh	Jakarta Timur	360
4	Saringan PGC	Cililitan	Jakarta Timur	300
5	Saringan Cengkareng Drain	Kembangan Utara	Jakarta Barat	270

Sumber: lingkunganhidup.jakarta.go.id, diakses pada Mei 2025

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, Saringan sampah yang berada di TB Simatupang memiliki rata-rata volume sampah tertinggi pada setiap bulannya jika dibandingkan dengan saringan sampah di titik lainnya di DKI Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup, 2023). Hal itu disebabkan oleh keberadaan Saringan Sampah TB Simatupang ini berada di sungai perbatasan, yang mana menjadi jalur masuknya sampah yang berasal dari hulu sungai daerah

sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan pembangunan saringan sampah ini diharapkan mampu mengendalikan sampah yang berasal dari daerah sekitar Jakarta agar tidak membawa sampah lagi ke Jakarta yang melalui sungai Ciliwung. Pembangunan saringan sampah TB Simatupang didasari pada adanya penekanan volume sampah pada Pintu Air Manggarai yang terdapat keterbatasan ruang menciptakan kesulitan pada manuver alat berat dan keluar masuknya truk sampah pada saat penanganan sampah.

Proyek pembangunan sampah di perbatasan ini menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air. Konsep ini muncul berdasarkan pada hasil kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga disepakati oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) (Hidup, 2022). Proses pengadaan lahan untuk pembangunan saringan sampah ini juga membutuhkan proses yang panjang karena melibatkan lahan dari beberapa pihak eksternal yang salah satunya adalah lahan Masyarakat. Dalam prosesnya terdapat kendala sengketa lahan dengan masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris lahan tidak terima bahwa lahan akan dilakukan pembangunan, namun hal ini dapat teratasi dengan baik oleh Dinas Sumber Daya Air yang merupakan kewenangannya (Merdeka.com, 2022). Dalam pembangunan saringan sampah segmen TB Simatupang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta sebesar 195 Milyar (DLH, 2022). Dengan biaya sebesar itu, membuat biaya operasional saringan sampah menjadi terbatas sehingga untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak bisa dilakukan secara langsung melainkan harus secara bertahap, karena selain untuk biaya operasional, dalam menjalankan saringan sampah ini membutuhkan biaya perawatan alat yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah (Wawancara dengan Informan 2, Mei 2025).

Saringan sampah memiliki 2 (dua) tahapan dalam menangani sampah yang akan dibedakan sesuai ukuran sampahnya. Pada awalnya sampah-sampah yang tersaring akan diangkut ke permukaan untuk dicacah menjadi potongan yang kecil untuk kemudian dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya. Sedangkan sampah yang tertolak akan disalurkan ke pusat daur ulang. Saringan sampah besar akan menyaring sampah yang berukuran besar seperti kayu, dahan pohon, balok, dan lainnya. Serta penyaring sampah kecil akan menyaring sampah kecil seperti botol plastik, plastik, sampah organik, dan lainnya. Program saringan sampah TB Simatupang ini dapat mengangkut sampah yang menumpuk di sungai untuk kemudian dikelola dengan menggunakan alat berat yang akan dipilah berdasarkan jenis sampahnya, setelah proses pemilahan akan terjadi proses pencacahan sampah untuk kemudian dimanfaatkan menjadi berdaya guna. Sampah organik yang terdapat di saringan sampah ini akan dikelola menjadi pupuk organik yang akan dimanfaatkan pada sejumlah taman yang terdapat di Jakarta untuk menciptakan ruang terbuka hijau. Sampah non organik yang tersaring di saringan sampah ini akan didaur ulang untuk dijadikan sebagai bahan bakar alternatif oleh industri semen. Sampah besi yang tersaring akan dipisahkan untuk kemudian di daur ulang. Sedangkan sampah yang tidak bisa diolah kembali akan dikirimkan ke TPST Bantar Gebang. Saringan sampah TB Simatupang ini mulai beroperasi sejak akhir tahun 2023, dan telah berhasil mencegah sebanyak 230 meter kubik sampah yang mengalir di hulu sungai Jakarta (Y. DLH, 2023).

Namun, meskipun pembangunan saringan sampah ini dinilai telah berhasil menangani permasalahan sampah yang terdapat di sungai Jakarta ini, nyatanya sampai saat ini masih banyak terdapat penumpukan sampah yang ada di sungai, hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri dari masyarakatnya sendiri (Alifah, 2023). Pada saat musim penghujan pun bencana banjir masih tetap terjadi akibat dari luapan air sungai ini, terutama di daerah TB Simatupang yang masih terdapat genangan air yang menggenangi jalan sehingga mengganggu aktivitas masyarakat sekitar (Cahyadi, 2024). Saat curah hujan yang tinggi juga akan banyak mendapatkan kiriman sampah yang mengalir di sungai yang berasal dari sungai di daerah sekitar Jakarta, sebagian besar sampah merupakan kiriman dari

Bogor yang mengalir di aliran sungai Ciliwung (Winanto, 2025). Karena pemerintah daerah sekitar Jakarta belum ada program khusus untuk menangani permasalahan sampah yang berada di aliran sungai, maka sampah kiriman tersebut menjadi dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta (Wawancara dengan Informan 2, Mei 2025). Selain itu dengan adanya program ini juga menimbulkan masalah lain seperti polusi suara yang disebabkan oleh suara alat berat yang digunakan untuk mengangkut dan mengelola sampah di SSTBS dan polusi udara yang berasal dari tumpukan sampah yang mengeluarkan bau busuk yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar SSTBS ini (Wawancara dengan Informan 3, Mei 2025). Berdasarkan beberapa masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perlu kajian lebih lanjut mengenai kebijakan pengelolaan sampah yang terkait dengan adanya program saringan sampah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini mengandung data fakta tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Program Saringan Sampah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk menentukan informan. Pada teknik ini, peneliti memilih informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih adalah mereka yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan data yang mendalam dan sesuai kebutuhan penelitian yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Sub Bagian Unit Penanganan Sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Koordinator Saringan Sampah TB Simatupang, dan Masyarakat RT 05 Kelurahan Tanjung Barat sebanyak 5 (lima) orang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas PMPTSP Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup, di Saringan Sampah TB Simatupang, dan Jalan Muara Dalam I RT05/RW03 Kelurahan Tanjung Barat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Program Saringan Sampah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan pada Teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang memiliki 2 (dua) indikator, yakni Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan.

A. Isi Kebijakan

Pada indikator Isi Kebijakan ini membahas mengenai pengaruh dari implementasi kebijakan terhadap manfaat dan sasaran yang menjadi tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan.

1. Kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Merilee S. Grindle adalah sesuatu yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan akan selalu terlibat dengan banyak pihak yang memiliki kepentingannya masing-masing yang mampu memberikan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan saringan sampah telah sesuai

sebab setiap stakeholder yang berpartisipasi dalam proses saringan sampah ini mempunyai kepentingannya masing-masing yang keberadaannya sangat mempengaruhi keberhasilan dari proses pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mayoritas peran dari stakeholder ini hanya berada pada proses perencanaan pembangunan saringan sampah ini yang bersifat administratif dan tidak secara langsung berpartisipasi di lapangan, karena dalam pelaksanaan saringan sampah ini dilakukan secara teknis, sehingga hanya melibatkan peran yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya.

Kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di DKI Jakarta yaitu dengan pelaksanaan kebijakan dengan program Saringan Sampah di sungai Ciliwung perbatasan TB Simatupang yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah ini program saringan sampah ini dilaksanakan. Untuk melaksanakan Saringan Sampah TB Simatupang ini dilakukan dengan beberapa tahapan yakni:

- a. Pelaksanaan perizinan penggunaan sungai untuk bangunan Saringan Sampah.

Perizinan ini dilakukan dengan mengajukan permohonan terkait dengan penggunaan sungai Ciliwung untuk pelaksanaan saringan sampah di wilayah sungai. Proses pengajuan izin ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC). Hal ini diperlukan sebab yang memiliki kewenangan atas sungai Ciliwung yang akan digunakan untuk mendirikan Saringan Sampah TB Simatupang ini adalah BBWS Ciliwung-Cisadane. Yang mana BBWSCC ini masih berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA).

Dengan adanya pelaksanaan pengajuan perizinan kepada BBWSCC ini merupakan langkah awal dari kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan saringan sampah dalam program Saringan Sampah TB Simatupang. Kepentingan yang mempengaruhi ini di dalamnya membahas mengenai seberapa besar suatu kepentingan dapat memberikan pengaruh pada proses implementasi kebijakan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perizinan kepada BBWSCC ini telah terlaksana sesuai dengan prosedur sehingga memberikan pengaruh pada keberhasilan dari proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan membangun saringan sampah di segmen TB Simatupang ini.

- b. Pelaksanaan perencanaan desain untuk bangunan Saringan Sampah.

Pelaksanaan perencanaan terkait dengan desain yang akan digunakan untuk membangun saringan sampah ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Proses ini dilakukan dengan membuat rancangan proyek, fungsi, inovasi, dan kapasitas saringan sampah yang akan didirikan di sungai Ciliwung segmen TB Simatupang. Hal ini diperlukan sebab Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab dan pengelola membutuhkan pihak lain yang memiliki kemampuan lebih untuk menggambarkan desain terkait dengan proyek saringan sampah yang harus dibuat berdasarkan analisis perhitungan dan prosedur pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya pelaksanaan perencanaan desain proyek saringan sampah yang dilakukan bersama dengan ITB ini menjadi suatu kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam program saringan sampah TB Simatupang ini, sebab setiap kebijakan yang akan diimplementasikan harus memiliki perencanaan yang baik agar mampu mengendalikan risiko yang kemungkinan akan muncul pada saat proyek sedang dibangun atau bahkan setelah proyek ini telah dilaksanakan. Maka dari itu

pelaksanaan perencanaan ini memberikan pengaruh pada proses implementasi kebijakan ini.

- c. Pelaksanaan penetapan besaran anggaran yang akan digunakan untuk Saringan Sampah.

Pelaksanaan penetapan besaran anggaran yang akan digunakan dalam implementasi kebijakan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. Proses ini dilakukan dengan mengajukan proposal pembangunan yang di dalamnya berisi mengenai rancangan proyek dan urgensi dari proyek ini kepada DPRD DKI Jakarta untuk dapat mendukung proyek saringan sampah ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Setelah proposal proyek telah disetujui, maka proyek saringan sampah akan dilaksanakan dengan anggaran yang diberikan oleh DPRD menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan adanya proses pengajuan anggaran ini sangat mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam program saringan sampah di TB Simatupang, sebab tanpa adanya anggaran yang memadai, proyek saringan sampah ini tidak akan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

- d. Pelaksanaan pengadaan lahan di sekitar lokasi Saringan Sampah TB Simatupang.

Pelaksanaan pengadaan ini berkaitan dengan lahan yang akan digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mendirikan bangunan saringan sampah yang berada di TB Simatupang. Dalam proses ini DLH bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air untuk proses pembebasan lahan trase sungai Ciliwung yang lahannya akan digunakan. Selain itu ada juga lahan dari pihak swasta dan masyarakat yang terkena upaya pembebasan lahan ini. Untuk melaksanakan saringan sampah ini diperlukan adanya perluasan lahan, sebab dalam membangun saringan sampah ini diperlukan lahan yang luas untuk menahan volume sampah yang besar, mampu mempermudah pengangkutan sampah yang telah tertahan di saringan, serta untuk mencegah sampah yang telah tertahan agar tidak menyebar lagi ke daerah lainnya.

Pembangunan saringan sampah di TB Simatupang telah melalui beberapa pertimbangan sampai akhirnya dipilih menjadi lokasi saringan sampah yang saat ini telah berjalan. Beberapa pertimbangan dilakukan adalah seperti akses yang memadai dan ketersediaan lahan yang sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga akan mempermudah proses pengadaan lahan bangunan saringan sampah ini. Untuk pengadaan lahan ini kemudian dilakukan pembebasan lahan milik masyarakat sekitar, sebelum itu DLH telah melakukan pendataan terkait lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan untuk keperluan pembangunan.

Dengan adanya pelaksanaan pengadaan lahan ini Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat sekitar selaku pemilik lahan yang terkena dampak dari pembebasan lahan dalam pembangunan Saringan Sampah TB Simatupang. Hal ini menjadi suatu kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini, sebab apabila pihak terkait yang memiliki lahan tidak bersedia melepas lahannya kepada DLH maka akan menjadi sengketa lahan, maka dari itu pelaksanaan pengadaan lahan ini memberikan pengaruh pada proses implementasi kebijakan dalam program saringan sampah di TB Simatupang.

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan indikator kepentingan yang mempengaruhi dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan saringan sampah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang mana dalam setiap proses tahapannya melibatkan pihak lain yang mendukung program hingga saringan sampah di TB Simatupang dapat berhasil terbangun sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan dapat berjalan dengan memberikan manfaatnya bagi pemerintahan dan lingkungan.

2. Jenis Manfaat

Jenis manfaat yang diperoleh menurut Merilee S. Grindle adalah sesuatu yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan harus memiliki beberapa jenis manfaat yang positif bagi yang merasakan dampaknya secara langsung dan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.

Saringan Sampah TB Simatupang ini memiliki dibangun dengan tujuan upaya pemerintah untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada di sungai Ciliwung yang kebanyakan merupakan sampah kiriman dari sungai hulu daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan adanya saringan sampah ini berfungsi untuk menahan sampah-sampah kiriman tersebut agar tidak masuk ke tengah kota dan mengurangi jumlah sampah yang akan dibawa ke TPST Bantar Gebang dengan melakukan pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah yang ada di saringan sampah TB Simatupang ini berhasil memanfaatkan kembali sampah yang telah diolah menjadi kompos dan Refuse Derived Fuel (RDF). Kompos yang dihasilkan ini akan disebarakan kepada berbagai pihak yang membutuhkan, dan penyaluran ini tidak memiliki batasan, siapa pun berhak menggunakan kompos tersebut. Sejauh ini pihak-pihak yang telah menggunakan kompos ini adalah instansi pemerintahan, masyarakat, sekolah, bahkan sudah digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan pada tahun 2024. Sedangkan untuk RDF merupakan bahan bakar alternatif pengganti baru bara yang hingga saat ini telah dimanfaatkan oleh PT Indocement. Saat ini saringan sampah TB Simatupang sedang dalam proses optimalisasi, sehingga kedepannya diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di sekitar lokasi saringan sampah.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, jenis manfaat yang diinginkan pada pelaksanaan saringan sampah dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh lingkungan dan pemerintah sesuai dengan yang diharapkan yakni berhasil mengurangi permasalahan mengenai persampahan yang berada di aliran sungai. Maka dengan adanya pelaksanaan saringan sampah ini mampu mewujudkan smart environment bagi Kota Jakarta, sebab telah menciptakan inovasi pengelolaan sampah dengan membangun infrastruktur yang berbasis teknologi terintegrasi, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan. Hal tersebut memberikan dampaknya pada lingkungan yang mampu memudahkan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam upaya pencegahan datangnya permasalahan lingkungan lainnya.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa dari adanya saringan sampah ini belum memberikan manfaat yang signifikan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Dengan adanya saringan sampah ini menurut pendapat masyarakat telah memberikan manfaat bagi lingkungan tempat tinggalnya, seperti mengurangi sampah yang menumpuk di bantaran sungai, mengurangi debit air yang meluap ke lingkungan masyarakat saat curah hujan sedang tinggi, serta mengurangi hewan liar yang berasal

dari sungai masuk ke Kawasan lingkungan masyarakat. Namun manfaat dari segi kualitas hidup dan perekonomian bagi masyarakat belum dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan tidak adanya upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi saringan sampah. Sosialisasi yang dilakukan juga hanya terdapat di awal perencanaan pembangunan saja, sehingga masyarakat kurang pengetahuan mengenai manfaat yang telah berhasil dicapai dengan adanya saringan sampah TB Simatupang.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan indikator jenis manfaat yang diinginkan telah berjalan dengan cukup optimal namun belum maksimal, sebab terdapat penemuan masalah pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat belum mampu meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan upaya untuk memperbaiki permasalahan tersebut dengan melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar ataupun melakukan kegiatan sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah 3R, sehingga dengan begitu masyarakat dapat memanfaatkan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya.

3. Derajat Perubahan

Derajat perubahan menurut Merilee S. Grindle adalah sesuatu yang menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diimplementasikan harus mencakup perubahan yang ingin dicapai yang dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Saringan Sampah TB Simatupang merencanakan perubahan pada jumlah sampah yang menumpuk di aliran sungai Ciliwung dapat berkurang karena telah tertahan di sungai perbatasan sebelum masuk ke tengah kota, sehingga sampah tersebut dapat diangkat untuk kemudian dapat dikelola lebih lanjut. Dengan adanya saringan sampah ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah yang ada di DKI Jakarta. Setelah permasalahan sampah di aliran sungai ini berhasil teratasi, maka berdampak pula pada bencana banjir yang biasanya terjadi karena luapan air sungai yang dipenuhi oleh tumpukan sampah.

Saringan sampah TB Simatupang saat ini telah berhasil dalam menahan sampah yang mengalir di sungai Ciliwung agar tidak masuk ke tengah kota, dan telah mengurangi sampah yang dibawa ke TPST Bantar Gebang. Pada tahun 2024, SSTBS ini memiliki jumlah volume sampah yang tertahan di saringan ini dengan rata-rata 600 ton per bulannya. Jika dibandingkan dengan saringan sampah di titik lainnya, Saringan Sampah TB Simatupang ini yang pelaksanaannya paling optimal, sebab sampah yang masuk sebagian besar berasal dari hulu sungai sekitar Jakarta.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, derajat perubahan yang dirasakan dengan adanya saringan sampah dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kebijakan pengelolaan sampah ini telah memberikan perubahan ke arah yang positif secara optimal. Saringan sampah TB Simatupang telah berhasil mengatasi permasalahan mengenai sampah yang berada di aliran sungai Ciliwung yang mayoritas merupakan sampah kiriman. Permasalahan mengenai sampah di aliran sungai ini perlu perhatian khusus, sebab masih banyak yang memandang sebelah mata mengenai permasalahan ini dengan lebih memprioritaskan sampah yang berada di wilayah daratan. Dengan inovasi membangun saringan sampah di aliran sungai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil keputusan yang tepat, sehingga membuat Jakarta menjadi satu langkah lebih maju jika dibandingkan dengan daerah lain.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan indikator derajat

perubahan bahwa saringan sampah TB Simatupang ini memberikan perubahan yang optimal bagi permasalahan sampah di aliran sungai. Namun dalam pelaksanaannya, saringan sampah ini masih memerlukan upaya peningkatan agar perubahan yang dirasakan dapat juga mengatasi permasalahan lainnya selain permasalahan sampah yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan saringan sampah ini.

Untuk meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan saringan sampah ini, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggiatkan program penghijauan di bantaran sungai sekitar Saringan Sampah TB Simatupang yang hingga saat ini masih dalam proses, sebab upaya penghijauan ini dilakukan secara bertahap. Upaya penghijauan ini berfungsi untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau dengan memanfaatkan lahan yang ada, sehingga jika berhasil hasil tanamannya dapat dimanfaatkan kembali.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan menurut Merilee S. Grindle merupakan sesuatu yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang diimplementasikan harus mengetahui bagaimana pengambilan keputusannya. Dalam hal ini stakeholder yang terlibat harus berpartisipasi pada setiap proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta pengambilan keputusan ini harus mempertimbangkan kepentingan bersama.

Pelaksanaan Saringan Sampah TB Simatupang yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan dilimpahkan kepada Unit Pengelolaan Sampah Badan Air (UPSBA) melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pada pucuk kepemimpinan. Setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh pimpinan kemudian akan disampaikan lagi kepada Kepala Penanggung Jawab di SSTBS. Namun jika hanya keputusan dalam lingkup internal saringan sampah TB Simatupang ini akan dilakukan pengambilan keputusan pada Penanggung Jawab dan Koordinator, lalu akan didiskusikan kembali kepada Tim Pelaksana untuk menjalankan keputusan yang telah disepakati.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terkait dengan letak pengambilan keputusan dalam pelaksanaan saringan sampah TB Simatupang sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan, tapi belum berjalan dengan maksimal pada keputusan mengenai pengadaan lahan. Hal itu disebabkan oleh bangunan saringan sampah ini yang terlalu dekat dengan lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan permasalahan bagi masyarakat sekitar karena tertanggung akibat adanya proyek saringan sampah ini. Masyarakat di sekitar mengeluhkan mengenai waktu operasional saringan sampah ini yang tidak wajar sehingga suara alat-alat yang digunakan mengganggu ketenangan masyarakat yang mana terdapat sebagian besar warganya adalah lansia dan anak-anak.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan indikator letak pengambilan keputusan yang sudah sesuai. Letak pengambilan keputusan dilakukan menggunakan strategi top-down yang membuat keputusan menjadi efektif. Namun dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan saringan sampah ini terdapat kendala pada pengadaan lahan lokasi saringan sampah TB Simatupang yang jaraknya terlalu dekat dengan lingkungan masyarakat. Maka dari itu, saringan sampah ini memerlukan perluasan bangunan dan memberikan jarak dengan lingkungan masyarakat, sehingga setidaknya dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat mengenai suara-suara bising yang muncul saat proses pengelolaan sampah sedang berlangsung.

5. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program menurut Merilee S. Grindle merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan yang diimplementasikan sebab berperan sebagai alat yang digunakan untuk dapat mencapai keberhasilan yang sesuai dengan kebijakan. Dalam pelaksanaan program ini terdapat para pelaksana yang berperan sebagai penyedia pelayanan dalam kebijakan.

Pelaksanaan program Saringan Sampah TB Simatupang dilakukan oleh tim pelaksana yang berasal dari Unit Pengelolaan Sampah Badan Air (UPSBA) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan program saringan sampah ini, maka dalam pelaksanaannya dilakukan pembagian tim pelaksana menjadi beberapa bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya, pada kegiatan pembagian tim pelaksana ini ditentukan berdasarkan pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh tiap pekerja. Dengan demikian pelaksana di lokasi saringan sampah tidak ada yang tugas dan fungsinya menjadi tumpang tindih lagi, sehingga dapat meningkatkan kinerja dari para pelaksana saringan sampah TB Simatupang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pelaksana program saringan sampah sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah, Tim pelaksana di Saringan Sampah TB Simatupang telah berhasil melakukan kinerja secara optimal dalam mencapai fungsi dan tujuan saringan sampah ini, sebab permasalahan sampah yang berada di aliran sungai Ciliwung telah teratasi dengan adanya saringan ini, sehingga sampah yang berasal dari hulu sungai sekitar Jakarta tidak lagi masuk ke kota karena telah tertahan di saringan sampah TB Simatupang yang kemudian diangkut dan dikelola oleh tim pelaksana.

Pelaksanaan saringan sampah ini telah dijalankan oleh tim pelaksana sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Setiap jumlah volume sampah yang masuk ke saringan meningkat pada saat tertentu misal pada curah hujan sedang tinggi, maka jumlah personil dan jam kerja dari tim pelaksana akan ditambah agar proses pengangkutan sampah dapat berjalan dengan efektif sehingga dapat mencegah banjir yang akan terjadi di Jakarta.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan indikator pelaksanaan program saringan sampah sudah berjalan secara optimal. Pelaksana program saringan sampah TB Simatupang telah berhasil menahan sampah di saringan dengan efektif sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang menggenangi di aliran sungai yang dengan cepat mengangkut sampah-sampah tersebut untuk selanjutnya sampah dapat diolah dengan mesin khusus pencacah yang dipisahkan sesuai dengan jenisnya yang tersedia di saringan sampah TB Simatupang.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan program saringan sampah ini adalah dengan mengoptimalkan fungsi saringan sampah ini dengan menerima sampah yang berasal dari lingkungan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar lokasi saringan sampah TB Simatupang ini juga dapat merasakan manfaat dengan adanya saringan sampah yang dibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di lingkungan sekitarnya. Selain itu perlu juga melakukan sosialisasi rutin mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di saringan sampah TB Simatupang, dengan begitu akan meningkatkan citra Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab pelaksanaan saringan sampah ini di mata masyarakat sekitar.

6. Sumber Daya

Sumber daya menurut Merilee S. Grindle merupakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan yang berfungsi untuk mendukung suatu kebijakan yang diimplementasikan untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya, sehingga kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar apabila sumber daya yang digunakan memadai dan memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan Saringan Sampah TB Simatupang telah memiliki sumber daya yang memadai, sebab sumber daya manusia (SDM) yang digunakan telah memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga dalam melaksanakan saringan sampah ini dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sumber daya teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan saringan sampah ini telah memadai, sebab alat-alat yang digunakan di saringan sampah ini merupakan alat terbaik yang pertama ada di Indonesia. Namun karena alat ini besar dan banyak, maka terdapat kesulitan dalam pemeliharannya, pemeliharaan alat ini dilakukan secara berkala. Kedepannya juga direncanakan akan ada penambahan alat-alat yang digunakan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan saringan sampah agar dapat mengangkut sampah dengan skala besar.

Sumber daya anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan saringan sampah ini juga sudah terbilang cukup memadai, sehingga pelaksanaan saringan sampah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Namun karena proses pembangunan saringan sampah ini telah menghabiskan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar 195 Milyar, sehingga menyebabkan proses pemeliharaan dan operasional menjadi terhambat sebab keterbatasan anggaran dari ketersediaan dana APBD yang ditetapkan. Maka dari itu, tim pelaksana di saringan sampah berusaha untuk memanfaatkan kembali sampah yang telah di proses di 3R dengan menjualnya ke pengepul, yang mana hasil penjualannya akan digunakan untuk menambah dana anggaran operasional.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan indikator sumber daya pada pelaksanaan saringan sampah sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup memadai, namun masih kurang maksimal pada anggaran yang tersedia. Hal tersebut membuat pelaksana saringan sampah menjadi harus memanfaatkan anggaran dengan tepat sesuai dengan skala prioritas kebutuhan anggaran. Untuk mengatasi kendala tersebut perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab saringan sampah ini. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala pada keterbatasan anggaran ialah dengan mencari investor yang bersedia untuk mendukung jalannya saringan sampah sesuai dengan fungsinya yang mengedepankan pemeliharaan saringan sampah yang telah berjalan selama ini.

Selain itu, ada pula upaya yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan saringan sampah ini yaitu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat di sekitar saringan sampah menjadi lebih berdaya guna dengan memanfaatkan tenaga dan keahlian yang dimiliki.

B. Lingkungan Kebijakan

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor Terlibat

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat menurut Merilee S. Grindle merupakan sesuatu perhitungan yang digunakan oleh aktor yang terlibat

dalam suatu kebijakan yang diimplementasikan yang berguna untuk mendukung dan memberikan keberhasilan pada implementasi kebijakan.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan Saringan Sampah TB Simatupang memiliki kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat yaitu dalam setiap proses sejak proses perencanaan hingga proses pelaksanaan saringan sampah. Hal ini disebabkan setiap proses yang dilakukan dalam pelaksanaan saringan sampah ini terlibat dengan beberapa stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Strategi para stakeholder yang terlibat selalu mendukung segala proses pelaksanaan saringan sampah untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Sebelum saringan sampah ini dilaksanakan, dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan saringan sampah. Sosialisasi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai urgensi dari pengelolaan sampah bagi lingkungan dan manfaat pembangunan saringan sampah ini, sehingga dengan demikian masyarakat dapat mendukung segala proses yang akan dilakukan. Selain itu, dalam sosialisasi ini juga dijelaskan mengenai rencana pengadaan lahan yang memerlukan peranan masyarakat untuk ikut dalam proses pembebasan lahan. Masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan tersebut diberikan kompensasi ganti rugi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hingga saat ini proses pembebasan lahan ini masih berjalan secara bertahap, sebab pelaksanaan proses ini harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang dilakukan secara bersama dengan stakeholder lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat dalam pelaksanaan Saringan Sampah TB Simatupang sudah berjalan dengan baik, sebab semua aktor yang terlibat memberikan dukungan penuh terhadap jalannya saringan sampah ini sesuai dengan kepentingannya dan prosedur yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kepentingan yang tumpang tindih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya saringan sampah ini perlu memaksimalkan strategi agar mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan saringan sampah TB Simatupang perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dari saringan sampah, serta memberikan informasi sejauh mana perubahan telah dirasakan sejak adanya pelaksanaan saringan sampah ini, sehingga masyarakat sekitar akan memberikan penilaian yang positif terhadap Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab saringan sampah TB Simatupang. Dengan demikian akan memberikan pengaruh yang positif pada dukungan yang akan diberikan oleh masyarakat sekitar terkait dengan pelaksanaan saringan sampah ini serta rencana peningkatan yang akan dilakukan kedepannya.

2. Karakteristik Lembaga

Karakteristik lembaga menurut Merilee S. Grindle merupakan sesuatu yang menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang diimplementasikan keberhasilan dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh karakteristik yang dimiliki oleh setiap lembaga atau pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan Saringan Sampah TB Simatupang yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini memiliki karakteristik lembaga yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh DLH sebagai pengelola telah menjalankan saringan sampah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah dan melaksanakannya sesuai dengan prosedur. Saringan sampah ini menjadi

bukti bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan persampahan yang berada di aliran sungai, yang mana selama ini dianggap bukan sebagai prioritas utama dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, sehingga dengan adanya saringan sampah ini dapat mencegah permasalahan lainnya yang akan timbul jika masalah sampah tidak di atasi dengan segera.

Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan saringan sampah TB Simatupang perlu adanya pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaannya dengan yang diharapkan, sebab dalam pelaksanaan saringan sampah ini melibatkan beberapa stakeholder, sehingga Dinas Lingkungan Hidup harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh pihak lain yang berperan untuk mendukung pelaksanaan program. Pada pelaksanaan saringan sampah membutuhkan dukungan dari DPRD DKI Jakarta dalam persetujuan anggaran yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka dari itu DLH perlu melaporkan penggunaan anggaran dengan melaksanakan audit yang dilakukan rutin secara berkala bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung antara kesesuaian anggaran yang diberikan dengan pemakaian yang digunakan untuk pelaksanaan saringan sampah.

Dengan pelaksanaan saringan sampah ini juga diperlukan adanya evaluasi secara berkala agar dapat memastikan bahwa pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga jika terdapat kekurangan dapat dijadikan pembelajaran untuk dilakukan perbaikan di kemudian hari. Salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana saringan sampah ini mengenai permasalahan polusi udara dengan adanya bau tidak sedap yang berasal dari sampah yang telah tertahan di saringan sampah ini ke lingkungan masyarakat sekitar. Dengan adanya permasalahan ini, para pelaksana melakukan evaluasi mengenai hal tersebut dengan melakukan kegiatan yang disebut sebagai proses pendewasaan, sehingga saat ini bau yang ditimbulkan menjadi lebih berkurang jika dibandingkan dengan saat awal saringan sampah ini berjalan. Selain itu, untuk tim pelaksana di Saringan Sampah TB Simatupang juga rutin mengikuti evaluasi dari Koordinator lapangan. Evaluasi dilakukan dengan tiga (3) parameter yang telah ditetapkan, yaitu kehadiran, kinerja, dan kedisiplinan. Dengan demikian karakter tersebut memberikan pengaruh positif bagi pelaksanaan Saringan Sampah TB Simatupang, sehingga pelaksanaan saringan sampah ini dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan indikator karakteristik lembaga dalam pelaksanaan saringan sampah TB Simatupang sebagai bentuk implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola saringan sampah ini selalu memastikan bahwa pelaksanaan saringan sampah TB Simatupang telah berjalan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan sebagai tujuan akhir dari saringan sampah yang dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala, sehingga berdampak pada peningkatan pelaksanaan saringan sampah ini.

3. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap menurut Merilee S. Grindle merupakan sesuatu yang mengukur mengenai sejauh mana pelaksana memiliki kepatuhan dan cepat tanggap dalam memberikan respon dengan menanggapi setiap permasalahan pada suatu kebijakan yang diimplementasikan yang berguna untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak yang terlibat dan keberhasilan pada proses implementasi kebijakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Saringan Sampah TB Simatupang, para pelaksana yang terlibat telah menjalankan kebijakan dengan baik dengan mempertahankan kepatuhannya terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan keberhasilan dalam pelaksanaan saringan sampah ini. Kepatuhan ini sangat penting dalam implementasi kebijakan, sebab apabila pelaksana di saringan sampah ini tidak patuh terhadap peraturan dan ketentuan, maka pelaksanaan saringan sampah ini akan tidak akan berhasil dan menjadi terbengkalai karena terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan saringan sampah ini Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebagai pengelola selalu berkomitmen untuk menjaga saringan sampah TB Simatupang agar dapat berjalan sesuai dengan bagaimana fungsinya yang merupakan implementasi dari kebijakan pengelolaan sampah, sehingga setiap pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya para pelaksana telah melakukan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dengan rutin, sehingga dapat mengurangi segala risiko yang dapat menjadi kendala bagi keberhasilan pelaksanaan saringan sampah ini. Selain itu, untuk memaksimalkan kinerja dari pelaksana saringan sampah ini juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya dengan proses pengembangan melalui pengalaman yang dilaluinya.

Sedangkan mengenai daya tanggap yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ataupun tim pelaksana di saringan sampah ini masih kurang dalam memberikan respon dengan efektif. Hal ini disebabkan pada pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar saringan sampah ini tidak diselesaikan dengan cepat. Hal ini terlihat pada proses pengelolaan pengaduan yang dilakukan oleh DLH ini belum terintegrasi, sebab belum terdapat wadah khusus yang dapat diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait dengan pelaksanaan saringan sampah, sehingga aduan yang telah disampaikan oleh masyarakat tidak dapat terpantau kemajuan pengelolaan pengaduannya. Dengan demikian masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap DLH, sehingga membuat beberapa masyarakat kurang mendukung pelaksanaan saringan sampah TB Simatupang yang bangunannya berada di sekitar lingkungan tempatnya tinggal.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan indikator tingkat kepatuhan dan daya tanggap pada pelaksanaan saringan sampah TB Simatupang sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan dengan baik, namun masih perlu adanya upaya peningkatan dalam daya tanggap yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya tanggap mengenai pengaduan-pengaduan masyarakat yaitu dengan menyediakan wadah khusus saringan sampah berupa website atau kontak resmi di media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Fungsi dari diperlukannya upaya ini adalah agar pengaduan yang telah disampaikan dapat dipantau prosesnya oleh masyarakat dan dari semua pengaduan yang telah masuk tersebut dapat dianalisa jenis pengaduan yang dianggap sebagai prioritas dalam proses pengambilan keputusan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut berdasarkan pada skala prioritas pengaduan yang masuk. Selain itu, website ini juga bisa diisi dengan data sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai manfaat yang diberikan dengan adanya saringan sampah TB Simatupang.

Kesimpulan

Saringan sampah ini merupakan salah satu wujud jadi implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang mengacu pada Peraturan Daerah Pemprov DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pelaksanaan program saringan sampah ini tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 untuk membangun saringan sampah di perbatasan. Maka dari itu saringan sampah ini dibangun di wilayah TB Simatupang yang menjadi perbatasan bagi sungai Ciliwung.

Pelaksanaan Saringan Sampah TB Simatupang sebagai bentuk implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan dengan cukup optimal. Pelaksanaan saringan sampah TB Simatupang menunjukkan bahwa telah berhasil mengatasi permasalahan mengenai persampahan di aliran sungai. Hal ini terlihat dari sampah yang menumpuk di aliran sungai Ciliwung yang terbawa dari sungai hulu karena telah berhasil tertahan di saringan sampah TB Simatupang untuk selanjutnya dikelola dengan beberapa tahapan menggunakan mesin-mesin khusus yang tersedia untuk diolah menjadi lebih bermanfaat, sehingga memberikan pengaruh pada jumlah volume sampah yang akan dibawa ke TPST Bantar Gebang.

Inovasi saringan sampah ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya mengatasi permasalahan persampahan yang dapat menyebabkan pencemaran bagi lingkungan, khususnya pencemaran air, sehingga pelaksanaan program ini dapat menanggulangi risiko yang akan muncul akibat sampah tersebut. Saringan sampah TB Simatupang mewujudkan Jakarta menjadi smart environment, sebab pelaksanaan saringan sampah ini memiliki fungsi yang berkelanjutan yang berbasis teknologi.

Dengan adanya pelaksanaan saringan sampah sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini menunjukkan bahwa berdasarkan isi kebijakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kepentingan yang berbeda namun memberikan pengaruh yang besar bagi keberhasilan program dan memberikan manfaat bagi lingkungan dan pemerintah dengan perubahan positif terhadap volume sampah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa sumber daya yang cukup memadai yakni sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya anggaran, serta segala keputusan yang ditetapkan untuk keberlangsungan saringan sampah ini menggunakan strategi top-down yang memberikan efektivitas dan koordinasi yang baik.

Sedangkan berdasarkan lingkungan kebijakan yakni strategi yang digunakan oleh para pihak yang terlibat sangat mempengaruhi keberhasilan saringan sampah ini, pengawasan dan evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan saringan sampah ini tetap berjalan sesuai dengan fungsinya, serta kemampuan pengendalian risiko yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola saringan sampah dalam menanggulangi risiko yang hadir juga menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan saringan sampah ini, sebab seiring dengan pelaksanaannya saringan sampah ini menimbulkan permasalahan lainnya, sehingga perlu diatasi dengan cepat.

Namun dalam pelaksanaan saringan sampah ini masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi agar dapat mengoptimalkan fungsi dari saringan sampah ini. Beberapa kendala yang ditemukan ialah manfaat yang belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat, keterbatasan anggaran yang tersedia untuk biaya operasional dan pemeliharaan alat, menimbulkan permasalahan baru seperti polusi suara dan polusi bau, belum adanya pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah, serta kurang tanggap dalam menangani pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat yang belum ada media yang dapat menampung aduan yang diajukan, sehingga kendala-kendala tersebut perlu segera diatasi agar dapat memberikan pengaruh positif terhadap upaya pengoptimalan fungsi pelaksanaan saringan sampah.

Daftar Pustaka

- Abdillah, F. H., Samudra, A. A., Retnowati WD Tuti, & Salam, R. (2022). Implementasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran Di Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8.5.2017), 2003–2005.
- Akbar, G. D. P. N. (2022). Analisis Penurunan Muka Tanah Kota Jambi Dengan Metode Differential Interferometry Synthetics Aperture Radar Tahun 2016 – 2021. *Jurnal Geosains Dan Remote Sensing*, 3(1), 20–29.
- Alifah, S. (2023). Mengulas Penyebab Banjir Akibat Kurangnya Kesadaran Masyarakat Di Wilayah DKI Jakarta. BPBD Jakarta.
- Amrina, D. H., Rahmah, N. A., & Sari, N. (2021). Kajian Dampak Sampah Rumah Tangga Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian Bagi Masyarakat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Berdasarkan Perspektif Islam. *Holistic Journal of Management Research*, 6(2), 42–59.
- Auliani, R. (2020). Peran Bank Sampah Induk dalam Pengelolaan Sampah Kota Medan. *Jurnal Abdidas*, 1(5), 330–338.
- Cahyadi, I. R. (2024). Hujan Deras, Sejumlah Jalan di Jakarta Tergenang Banjir. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/2809049/hujan-deras-sejumlah-jalan-di-jakarta-tergenang-banjir> diakses pada 18 Juni 2024 pukul 03.28
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Dinas Lingkungan Hidup. (2023). Rencana Strategis Dinas lingkungan hidup DKI Jakarta 2023-2026. 53–54.
- Disperkimta. (2019). Dampak Lingkungan Kotor dan Polusi Sampah. <https://disperkimta.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/dampak-lingkungan-kotor-dan-polusi-sampah-32> diakses pada 2 Juni 2024 pukul 00.24.
- DLH, Instagram. (2023). Saringan Sampah. @DKIJakarta.
- DLH, Youtube. (2023). Saringan Sampah Ciliwung-TB Simatupang. PEMPROV DKI JAKARTA.
- DLH. (2022). Sistem Saringan Sampah Badan Air di Perbatasan Jakarta _ Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/article/post-251#> diakses pada 6 Maret 2025 pukul 08.09.
- El Salamony, D. H., Hassouna, M. S. E., Zaghoul, T. I., & Abdallah, H. M. (2024). Valorization of Chicken Feather Waste Using Recombinant Bacillus Subtilis Cells By Solid-State Fermentation For Soluble Proteins And Serine Alkaline Protease Production. *Bioresource Technology*, 393.
- Fajarwati, A., & Rahmadila, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle. *Dialog*, 7(1).
- Hakim, L., Rochima, E., & Santhy Wyantuti, dan. (2021). Policy Implementation and Realization of Spatial Planning in Garut Kota District in Garut Regency: Policy Analysis Study. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 163–175.
- Hidup, D. L. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan 2022. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Ihsani. (2022). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan di Kota Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Islamiyah, N. Q., et. al. (2022). Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan Di Era Pandemi Covid – 19 Di Kelurahan Warugunung, Kota Surabaya. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 19(1), 1–12.
- Jakarta, B. U. (2023). Langkah Pemprov DKI Jakarta Atasi Sampah di Badan Air - Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
-

-
- <https://www.beritasatu.com/megapolitan/2809049/hujan-deras-sejumlah-jalan-di-jakarta-tergenang-banjir> diakses pada 2 Juni 2024 pukul 14.22.
- Jakarta, D. D. (2021). Program Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. *Lingkunganhidup.Jakarta.Go.Id*.
<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/program/sampah> diakses pada 5 Maret 2025 pukul 21.16.
- Kazemi, F., & Hosseinpour, N. (2022). Gis-Based Land-Use Suitability Analysis For Urban Agriculture Development Based On Pollution Distributions. *Land Use Policy*, 123.
- Kemendagri. (2007). Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. *Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*, 1–8.
- Merdeka.com. (2022). Warga Tolak Proyek Pembangunan Saringan Sampah Di Simatupang, Pemprov DKI Putuskan Tetap Lanjut. <https://www.merdeka.com/jakarta/warga-tolak-proyek-saringan-sampah-di-simatupang-pemprov-dki-putuskan-tetap-lanjut.html> diakses pada 6 Maret 2025 pukul 07.42.
- Mustopa, A. K., et. al (2023). Pencegahan Banjir dan Penumpukan Sampah Melalui Penerapan Lubang Biopori di Desa Jayabakti, Sukabumi. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 5(1), 34–42.
- Nisa, A. N. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294.
- Nugroho, R. (2021). Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan. *Elex Media Komputindo*.
- Nurlukman, A. D., & Basit, A. (2023). Implementasi Smart Environment City Dalam Tata Kelola Lingkungan Di Kota Tangerang. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 769–784.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2019). Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. 6, 583–606.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Purnomo, C. W. (2020). Solusi Pengelolaan Sampah Kota. In Gajah Mada University Press. UGM Press.
- SIPSN. (2024). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/> diakses pada 29 Mei 2024 pukul 12.32.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. *Brilliant PT Menuju Insan Cemerlang*.
- Sugiyono, S., & Lestari, P. (2021). Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artikel Pada Jurnal Internasional). Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Sutalhis, M., Nursiwan, & Novaria, E. (2024). Analisis Manajemen Sampah Rumah Tangga Di Indonesia: Literatur Review. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 97–106.
- Wahab, & Abdul, S. (2021). Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (Fandy Hutari (ed.)). Bumi Aksara.
- Wekke, I. S. (2021). Mitigasi Bencana. Penerbit Adab.
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (W. Setiyono, Y. Setyorini, & I. Basuki (eds.)). Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Winanto, A. (2025).). DLH DKI Jakarta Angkut 2000 Ton Sampah Pasca Banjir.
<https://dlhkijakarta.or.id/berita/DLH-DKI-Jakarta-Angkut-2000-Ton-Sampah-Pasca-Banjir/> diakses pada 6 Maret 2025 pukul 08.28.
-